



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA BAGIAN PENGAWASAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ni Luh Supri Cahayani, S.Sos.,M.AP

Jabatan : Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Bali

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ida Bagus Putu Adinatha, AP., M.Si

Jabatan : Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Ida Bagus Putu Adinatha, AP., M.Si

Denpasar, 11 Maret 2026

Pihak Pertama,

Ni Luh Supri Cahayani, S.Sos.,M.AP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA BAGIAN PENGAWASAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2026
1.	Meningkatnya Kualitas Instrument dan Kegiatan Pencegahan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan	1 Laporan
		Jumlah Fasilitas Penguatan Pemahaman Kepemiluan Kepada Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya	1 Laporan
2.	Meningkatnya Fasilitas Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	1 Laporan
3.	Meningkatnya Pengawasan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan pemutakhiran daftar pemilih tetap berkelanjutan	1 Laporan
4.	Meningkatnya layanan Data dan Informasi	Jumlah Laporan pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik yang tersedia	1 Laporan
5.	Meningkatnya Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Jumlah Laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi	1 Laporan

Program		Anggaran	
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp.	67.438.000,-
2.	Dukungan Manajemen	Rp.	6.040.000,-

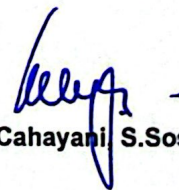
Pihak Kedua,



Ida Bagus Putu Adinatha, AP., M.Si

Denpasar, 11 Maret 2026

Pihak Pertama,



Ni Luh Supri Cahayani, S.Sos., M.AP